

Naik Rp 400 Miliar Selama Kepemimpinan Aditya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Banjarbaru Tertinggi di 2024



Sumber gambar:

<https://banjarbaruklik.com/wp-content/uploads/2024/07/Masyarakat-berkumpul-di-depan-Kantor-Balai-Kota-Banjarbaru.jpg>

Kepemimpinan Wali Kota Banjarbaru, H M Aditya Mufti Ariffin SH MH berhasil meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Banjarbaru secara signifikan dalam tiga tahun terakhir. Di bawah arahnya, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ini melihat kenaikan APBD yang kini mencapai total Rp 400 miliar.

“APBD Kota Banjarbaru meningkat tajam dan mencatat rekor tertinggi pada tahun 2024, hampir mencapai Rp 1,5 triliun. Dalam tiga tahun terakhir, ada peningkatan akumulatif sebesar Rp 400 miliar,” ujar Aditya, Senin (22/7/2024) pagi.

Aditya juga menambahkan bahwa tren positif ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2025, berdasarkan proyeksi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025. “Kami memproyeksikan kenaikan lebih lanjut pada tahun 2025. Insya Allah, APBD bisa menembus Rp 1,5 triliun,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, APBD terdiri dari tiga komponen utama yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Menurut laporan tahun 2023, Banjarbaru menduduki peringkat pertama dengan persentase realisasi pendapatan daerah tertinggi, yakni 114,96 persen, di antara kota-kota lain di Indonesia.

Peningkatan sebesar Rp 400 miliar dan persentase pendapatan tertinggi merupakan pencapaian luar biasa yang menjadi modal besar bagi pembangunan Banjarbaru di berbagai bidang. Ini menjadi lebih berarti mengingat pada awal kepemimpinan Aditya tahun 2021, Banjarbaru masih bergelut dengan dampak pandemi.

"Pada awal 2021, Banjarbaru masih dalam tahap pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Kami dituntut untuk merancang strategi pembangunan yang stabil sembari memulihkan ekonomi. Alhamdulillah, semuanya berjalan baik," ungkap Aditya. Aditya menekankan bahwa dukungan dari legislatif dan seluruh perangkat daerah di Banjarbaru sangat berperan dalam pencapaian ini.

Dengan APBD yang terus meningkat, Banjarbaru kini memiliki potensi besar untuk pembangunan berkelanjutan. Hal ini menandai langkah Walikota Aditya dalam merencanakan pembangunan yang terarah untuk masa depan.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Kepemimpinan Wali Kota Banjarbaru H M Aditya Mufti Ariffin sukses menorehkan peningkatan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sepanjang 3 tahun terakhir. Kini APBD Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan telah menembus tren kenaikan Rp 400 miliar.

"APBD Kota Banjarbaru meningkat pesat dan tercatat dalam sejarah tertinggi di tahun 2024 ini yaitu hampir mencapai 1,5 triliun rupiah. Jika dirunutkan dalam 3 tahun terakhir terjadi tren kenaikan dengan akumulasi total mencapai 400 miliar rupiah," kata Aditya, Senin (22/7/2024) pagi.

Ditambahkan Aditya, tren kenaikan APBD ini juga diproyeksikan akan terus berlanjut hingga pada 2025 mendatang. Hal itu sebagaimana proyeksi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025. "Akan diproyeksikan naik lagi pada 2025. Insya Allah, ini akan tembus 1,5 miliar rupiah," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, struktur APBD sendiri terbagi dalam 3 komponen utama yakni pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Faktanya berdasarkan laporan 2023, Kota Banjarbaru menempati peringkat 1 dengan persentase tertinggi realisasi pendapatan daerah sebesar 114,96 persen, tertinggi untuk Kota se-Indonesia.

Mewariskan kenaikan Rp 400 miliar dan raih persentase tertinggi ini tentu menjadi pencapaian yang sangat luar biasa dan modal besar untuk membangun Banjarbaru di segala bidang.

Apalagi pada awal kepemimpinan Aditya 2021 silam, perekonomian di wilayah Banjarbaru masih terdampak pandemi. "Pada awal tahun 2021 itu Banjarbaru masih kesulitan dan berupaya membangkitkan kembali roda ekonomi. Kami dituntut merancang strategi pembangunan yang stabil bersamaan pula dengan fokus pemulihan ekonomi. Alhamdulillah, semua itu bisa dilaksanakan dengan baik," ujar Aditya.

Sekarang, dengan dukungan postur APBD yang terus mengalami kenaikan, Banjarbaru memiliki potensi besar dalam pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini tentunya menandai langkah Walikota Aditya dalam merancang pembangunan yang terarah di tahun-tahun yang akan datang. "Ini juga berkat dukungan penuh legislatif dan seluruh perangkat daerah di Kota Banjarbaru," ucap Wali Kota Banjarbaru tersebut.

Sumber Berita

1. <https://banjarbaruklik.com/naik-rp-400-miliar-selama-kepemimpinan-aditya-apbd-banjarbaru-tertinggi-di-2024/>, Naik Rp 400 Miliar Selama Kepemimpinan Aditya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Banjarbaru Tertinggi di 2024, (22/07/2024).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/22/tapaki-jejak-3-tahun-kepemimpinan-wali-kota-aditya-apbd-banjarbaru-terakumulasi-naik-rp400-miliar>, Tapaki Jejak 3 Tahun Kepemimpinan Wali Kota Aditya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Banjarbaru Terakumulasi Naik Rp 400 Miliar, (22/07/2024).

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan aset sampai aset siap digunakan.

